

Menyatukan Langkah, Memajukan Negeri

INSIGHT

Buletin Ekonomi Syariah



POTENSI INDONESIA Jadi Pusat Logistik Halal Dunia



Diterbitkan oleh:
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Kantor KNEKS, Gedung Permata Kuningan Lantai PH
Jalan Kuningan Mulia No. 9C



FOKUS UTAMA

POTENSI INDONESIA Jadi Pusat Logistik Halal Dunia

WAWANCARA



07

HALAL LOGISTIK SEKTOR INDUSTRI YANG MENJANJIKAN

Budi Santosa Chulasoh – Ketua ALI Chapter Jawa Barat



11

MELIHAT POTENSI INDONESIA DALAM MENGEMBANGKAN HALAL LOGISTIK

Raden Didiet Rachmat Hidayat – Dosen, Peneliti dan Pengamat Logistik Halal

AKADEMIA



15

CORONA, MOMENTUM CETAK BIRU LOGISTIK HALAL INDONESIA MENUJU PUSAT HALAL DUNIA

Zaroni
Chief Financial Officer (CFO)
Pro Logistik Indonesia, Senior Consultant of Supply Chain Indonesia

Khairunnisa Musari
Dosen Tetap Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi IAIN Jember



19

MENILIK PELUANG LOGISTIK HALAL INDONESIA DENGAN BALANCE SCORECARD

Gema Firman Ithai, S.Akun
Pengantar ISIRI (Insight Syariah) dan Mahasiswa S2 ISI Malaysia

Rizkiyyah Al Husanaa', S.E
Pengantar ISIRI (Insight Syariah) dan Mahasiswa S2 IKIP

Imam Zulfian, S.Akun
Pengantar ISIRI (Insight Syariah) dan Mahasiswa S2 ISI Malaysia



Ventje Rahardjo Soedigno
Executive Director of KNEKS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Buletin Insight edisi Maret 2020 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. *Sholawat* dan salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia seharusnya menjadi sentra perkembangan ekonomi Syariah di dunia. Potensi kearah sana sebenarnya sudah ada mulai dari sertifikasi halal, kepedulian terhadap produk ramah Muslim, pelayanan yang memudahkan Muslim menjalankan keyakinannya, dan banyak lagi. Sementara itu produk halal sendiri telah menjadi kebutuhan penting bagi pemeluk agama Islam. Makanan dan minuman halal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap insan Muslim. Bagi Muslim, makanan dan minuman halal adalah keharusan, karena konsumsi keduanya menggambarkan ketaatan kepada Sang Pencipta. Al Qur'an seperti dalam surat An-Nahl (16): 114, menyebutkan keharusan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Konsumsi dua hal tadi yang mengandung nilai akan mempengaruhi kualitas nutrisi dan kejernihan hati yang menentukan sikap. Suatu produk sendiri disebut halal bila mengacu pada kriteria syariat Islam seperti halal zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara pengolahannya. Pada kriteria yang terakhir mensyaratkan adanya proses produk halal, yang mencakup rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalannya produk diantaranya penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian dan penjualan. Sehingga dari lingkup rangkaian kegiatan ini diperlukan suatu sistem rantai pasok yang menjamin proses produk halal.

Peningkatan permintaan produk halal yang semakin meningkat mendorong lahirnya kebutuhan akan pentingnya logistik halal. Sebagai bagian dari manajemen rantai pasok produk halal, logistik halal berperan penting dalam proses penyimpanan, transportasi, dan distribusi produk-produk halal ke konsumen. Sistem logistik halal harus menjamin bahwa produk-produk tetap terjamin kehalalannya selama proses kegiatan logistik, baik di gudang, depo, terminal, alat angkut, dan pengemasan. Dengan demikian konsep *supply chain* untuk sebuah proses halal adalah sebuah jaminan. Geografi Indonesia yang sangat luas memiliki potensi untuk terjadinya kontaminasi dalam alur distribusi terhadap sebuah produk, baik dikarenakan keterbatasan infrastruktur, maupun keterbatasan *knowledge*. Oleh karenanya dibutuhkan edukasi untuk semua masyarakat mengenai hal tersebut. Sehingga diharapkan ke depan Indonesia memiliki *Indonesia Halal Supply Chain & Logistics Master Plan* (IHMN) yang mempertimbangkan sisi *supply chain* dan logistik secara nasional.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tengah menyusun Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal yang mencakup pengembangan logistik halal. Strategi ini berbentuk rencana implementasi pengembangan logistik halal yang terdiri dari pengemasan, penyimpanan, transportasi dan distribusi ke konsumen yang dapat diimplementasikan sebagai sebuah rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan juga standar prosedur suatu produk dan jasa. Penyusunan ini turut menyertakan akademisi dan juga pelaku usaha dalam merumuskannya. Strategi tersebut nantinya diharapkan dapat menciptakan integrasi nilai halal yang dapat menjamin ketertelusuran (*traceability*) dan kualitas produk halal di Indonesia. Selamat Membaca.

*Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

DEWAN REDAKSI

DEWAN PENGARAH KNEKS & MANAJEMEN EKSEKUTIF

PIMPINAN UMUM

Sutan Emir Hidayat

PIMPINAN REDAKSI

Ginjar Dewandaru

REDAKTUR PELAKSANA

M. Quraisy

REDAKTUR AHLI

Mohamad Soleh Nurzaman

Sudarmawan Samidi

Ni Putu Desintya

REDAKSI

Citra Atrina Sari

Annisa Permata

Nadiyah Hidayati

Diterbitkan oleh:

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Gedung Permata Kuningan, Lantai PH
Jalan Kuningan Mulia No. 9C, Jakarta,
12980, Indonesia

E-mail: redaksi-knksinsight@knks.go.id

Website: www.knks.go.id

POTENSI INDONESIA

Jadi Pusat Logistik Halal Dunia

➔ Maret 2016, Lembaga Riset Frost and Sullivan mengeluarkan data survei yang sarat optimisme. Dikatakan bahwa pada periode 2015-2020, industri transportasi dan logistik di Indonesia naik hingga 15,4 persen, sehingga pada 2020 nanti total perputaran senilai Rp4.396 triliun. Dari total perputaran tersebut, aktivitas dari logistik mencapai Rp3.297 triliun.

➔ Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memprediksi potensi pertumbuhan bisnis logistik bisa mencapai lebih dari 30 persen hingga 2020. Terkait ini Ketua Kompartemen Bidang *e-commerce* DPP ALFI Yan Henry Joewana mengatakan, potensi ini akan terus tumbuh dengan banyaknya pemain logistik baru, estimasinya bisa mencapai Rp40 triliun lebih per tahun.

Dua berita tersebut diambil dari periode yang berbeda. Berita pertama dilansir pada Maret 2016 dan berita kedua pada Juli 2019. Pesan dari kedua berita tersebut sama, yakni optimisme. Para pelaku bisnis logistik optimis bahwa bisnis mereka akan terus berkembang seiring dengan

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil meskipun pada level moderat.

Namun tiba-tiba tanpa diduga, virus Corona menyerang secara membabi-butu. Virus Corona jenis *Covid-19* sejenak meluluhlantakan konfigurasi perekonomian dunia. Wuhan, salah satu kota terbesar di China merupakan wilayah yang diserang duluan. Kota dengan penduduk 11 juta itu langsung dinyatakan tertutup agar virus tidak semakin menyebar. Secara tidak langsung, penutupan Wuhan berdampak pada kota lain di China. Berbagai kegiatan industri terhenti. China menjadi setengah lumpuh.

Rupanya *Covid-19* tidak berhenti di China. Beberapa pekan setelah Wuhan ditutup, muncul informasi dari satu-dua negeri yang mengabarkan bahwa virus Corona sudah menyerang warganya. Sampai tulisan ini dibuat, sudah 25 negara yang terkena *Covid-19*, termasuk negara ASEAN seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, Filipina, dan Indonesia.

Di Indonesia sampai Minggu (8/3/2020) terdapat enam orang positif Corona dan 21 pasien *suspect* virus Corona.

Serangan membabi-butu virus Corona di China dan puluhan negara lain telah membuat perekonomian *global* goyah. China sebagai salah satu pusat ekonomi dunia dipastikan akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Bank Dunia yang semula optimis bahwa tahun ini ekonomi *global* akan tumbuh lebih baik dari tahun lalu (dengan pertumbuhan ekonomi 2,5 persen pada 2020 dan 2,4 persen pada 2019) siap mengoreksi angka tersebut.

Indonesia tak terkecuali. Perdagangan Indonesia-China memiliki transaksi terbesar dibanding Indonesia dengan negara lain. China merupakan importir terbesar bagi Indonesia, sekaligus menjadi negara tujuan ekspor terbesar Indonesia.

Sehingga, ketika ekonomi China 'meriang', Indonesia pun akan terimbas. Perdagangan dengan negara lain pun, otomatis akan terganggu.

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 yang dipatok 5,3 persen hampir pasti akan terkoreksi. Pada situasi seperti itu, seluruh kegiatan ekonomi akan melemah. Tidak mati, tapi melemah. Industri logistik tak terkecuali karena ketika frekuensi lalu lintas barang menyusut, logistik dengan sendirinya akan terkena imbasnya lebih dulu.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita seperti dikutip CNBC Indonesia, pada Kuartal I 2020 ini pertumbuhan industri logistik stagnan. Salah satu penyebabnya saat ini aktivitas logistik menggunakan angkutan udara terhenti karena tidak ada penerbangan langsung ke China. Dampaknya, ekspor ikan segar dan impor barang-barang *e-commerce* terhenti. Industri kargo udara otomatis terganggu.

“

Pada Kuartal I 2020 ini pertumbuhan industri logistik stagnan. Salah satu penyebabnya saat ini aktivitas logistik menggunakan angkutan udara terhenti karena tidak ada penerbangan langsung ke China. Dampaknya, ekspor ikan segar dan impor barang-barang e-commerce terhenti. Industri kargo udara otomatis terganggu.

”

Menurut Zaldy, pada 2020 ini sebenarnya industri logistik bisa tumbuh 14 persen, tapi setelah virus Corona datang, prediksi tersebut akan terpankas. Apalagi sudah dua bulan ini, wabah virus masih menghantui bukan hanya China, tetapi juga masyarakat *global*. Sejauh ini pengiriman barang lewat laut masih berlangsung, tetapi volumenya juga berkurang.

Pandangan serupa dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Forwarder dan Logistik Indonesia (ALFI) Yuki Nugrahawan Hanafi. Dalam sebuah wawancara di televisi, dia mengatakan bahwa tahun 2020 menjadi lebih penuh tantangan. Ada dua penyebab, yakni perang dagang Amerika-China belum menemukan jalan keluar dan kehadiran virus Corona. Tapi Yuki tetap yakin bahwa industri logistik akan tetap tumbuh.

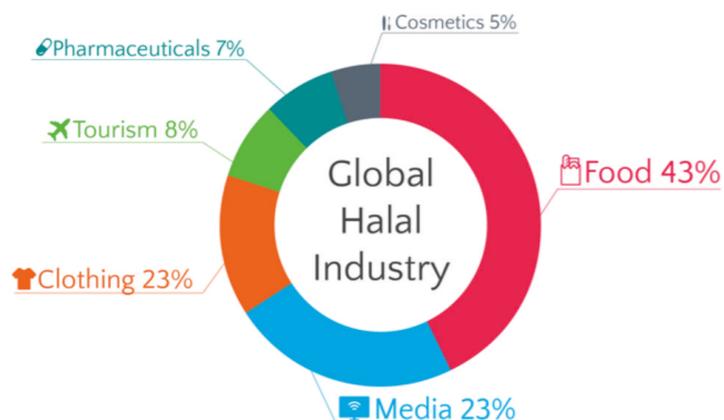
Selama ini berdasarkan pengalaman, pertumbuhan industri logistik sekitar dua kali lipat pertumbuhan ekonomi. Tarohlah pertumbuhan ekonomi tahun ini 4,7-5 persen, maka pertumbuhan industri logistik menurut Yuki masih bisa di posisi delapan persen. Karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif agar industri logistik dalam negeri bisa meningkatkan daya saing

sehingga semakin banyak barang ekspor-impor yang menggunakan jasa logistik dalam negeri. Dalam hal lain, perdagangan antarpulau di Indonesia juga perlu ditingkatkan. Sejak 2015 silam pemerintah sudah menjalankan konsep tol laut, tapi sampai saat ini komitmen untuk menekan disparitas harga antarwilayah belum terlaksana. Realitas di lapangan masih terjadi disparitas harga yang cukup signifikan untuk daerah-daerah di wilayah timur. Perlu evaluasi lebih mendalam terkait belum berhasilnya tol laut dalam menurunkan disparitas harga. Di balik tantangan yang semakin kompleks karena merebaknya virus Corona, pemerintah dan pelaku usaha perlu menyisir celah-celah yang bisa dijadikan peluang. Prinsip seorang *entrepreneur* adalah dibalik kesulitan selalu ada peluang untuk mendapatkan keuntungan. Tinggal bagaimana kita bisa mencari peluang.

Semakin baiknya infrastruktur dan berkembangnya *e-commerce* menjadi modal penting untuk lebih mengoptimalkan industri logistik. Indonesia yang pada 2018 lalu menempati urutan ke 46 (naik dari posisi 2016 yang 63) pada peringkat *Logistics Performance Index* (LPI) dari Bank Dunia sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Peningkatan peringkat tersebut bisa menjadi peluang untuk lebih mengembangkan industri logistik. Jadi, meski pada 2020 ini sarat dengan tantangan, tetapi selalu tersedia peluang untuk tetap *survive*.

Potensi Indonesia menjadi pusat bisnis halal dunia dan termasuk pada sektor logistik

Ketika kita makan steak di restoran dengan label halal, pernahkah kita berpikir bahwa seluruh proses yang dilalui dari penyembelihan sampai terhidang di meja benar-benar halal?



Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena jika kita bicara tentang halal maka seluruh proses yang dilewati harus halal. Mulai dari proses produksi (penyembelihan), pengolahan, pengemasan, penyimpanan, distribusi, dan terakhir sampai pada cara memasak semua harus halal.

Pada seluruh rangkaian proses tersebut, logistik memiliki peranan penting. Untuk itulah dalam satu dekade terakhir ini pemaparan dan diskusi mengenai pentingnya logistik halal intensif dilakukan. Pentingkah perusahaan logistik bersertifikat halal? Apa yang harus dihalalkan? Pertanyaan itu sering terlontar di kalangan orang awam.

Sertifikat halal adalah hukum tertulis dari MUI yang menyatakan bahwa proses atau produk yang dihasilkan telah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat itu bertujuan untuk menjamin bahwa produk yang dipakai adalah halal. Dalam kaitannya dengan logistik maka produk yang didistribusikan sampai pelanggan tetap dijamin kehalalannya.

Pada prinsipnya logistik halal adalah proses penanganan arus bahan atau produk melalui rantai pasokan (*supply chain*) yang sesuai dengan standar halal. Fokus dari logistik halal adalah mendasarkan pada pemisahan (*segregation*) dan

bukan pada deteksi atau kecurigaan semata. Pada posisi ini logistik halal akan memastikan konsistensi penanganan halal sebagaimana diharapkan masyarakat muslim.

Di dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada tiga pasal yang terkait langsung dengan masalah logistik halal yakni :

- ✎ *Pasal 1* : Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
- ✎ *Pasal 4* : Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia WAJIB bersertifikat halal.
- ✎ *Pasal 50* yang berbunyi: Pengawasan JPH dilakukan terhadap lokasi, tempat, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal.

Dari ketiga pasal itu tersurat bahwa produk halal perlu dipersiapkan dan disampaikan kepada masyarakat.

Logistik memainkan peran strategis dalam melindungi integritas makanan halal melalui transportasi, penyimpanan, dan penanganan yang tepat di sepanjang rantai pasokan hingga mencapai tujuan akhir.

Pasar logistik halal luar biasa besar. Saat peresmian Kawasan *Halal Park* di Stadion Utama Gelora Senayan 2019 lalu, Presiden Jokowi menyebutkan permintaan produk halal tumbuh pesat. Pada 2013 permintaan produk halal baru di kisaran 2 triliun dolar AS, pada 2019 diperkirakan sudah mencapai 2019. Pertumbuhan itu akan terus terjadi mengingat produk halal sudah menjadi bagian hidup bagi masyarakat muslim yang secara populasi juga tumbuh luar biasa.

Data yang senada juga disajikan oleh Dinar Standar dalam *State Global Islamic Economy 2019/2020*. Disampaikan bahwa dolar yang dibelanjakan oleh 1,8 miliar muslim di dunia mencapai 2,2 triliun dolar AS pada 2018 untuk kategori makanan halal, *fashion*, wisata halal, serta media dan rekreasi.

Belanja produk halal diperkirakan akan terus tumbuh. Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan pertumbuhan terjadi secara konsisten di antaranya pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dari negara mayoritas muslim, tingkat kesejahteraan muslim yang meningkat, meningkatnya kapatuhan terhadap nilai-nilai etika sebagai muslim, serta keterlibatan perusahaan multinasional dan investor *global*.

Selain itu juga semakin banyak negara yang mendedikasikan produknya dengan produk berbasis halal. Negara yang sigap menyempit peluang logistik halal adalah Malaysia. Negara yang sudah akrab dengan produk halal sejak awal 1980an dengan

didahului pendirian bank Islam, telah menisbatkan diri sebagai *global hub* produk halal. Salah satu yang didesain sejak awal menjadi *global hub* adalah Tanjung Mas Halal Hub di Sarawak.

Dalam kaitan dengan *supply chain* Malaysia telah menerbitkan standar yang merupakan turunan dari standar MS 1500:2004 *Halal Food* tersebut di atas, antara lain :

- ✎ MS 2400-1:2010 Halalan-Toyyiban Assurance – MS Requirements for Transportation of Goods and/or Cargo Chain Services.
- ✎ MS 2400-2:2010 Halalan-Toyyiban Assurance – MS Requirements for Warehousing and Related Activities.
- ✎ MS 2400-3:2010 Halalan-Toyyiban Assurance Pipeline – MS Requirements for Retailing.

Indonesia sejauh ini masih meraba-raba tentang bagaimana mengoptimalkan kelebihan yang dimiliki, terutama pasar yang besar, untuk memajukan logistik halal. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia seharusnya mengambil peran dalam industri halal dunia, termasuk logistik.

Dengan penduduk muslim yang besar, Indonesia jangan hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen barang halal. Indonesia perlu membuat *roadmap* untuk logistik halal. Dalam *Masterplan* Ekonomi Syariah, logistik halal tidak disinggung secara khusus, hanya tersirat dalam pernyataan bahwa jaminan produk halal bukan hanya di hulu dan hilir, tetapi juga ketika produk berada di antara hulu dan hilir.

Dalam peringkat *Global Islamic Economy Indicator 2018/2019*, Indonesia masih berada di peringkat 10. Dari enam kategori yang dibuat peringkat, Indonesia masuk 10 besar tiga kategori yakni keuangan, wisata, dan *fashion*.

Tapi dalam hal wisata, Indonesia beberapa kali mendapat peringkat pertama salah satunya pantai Mandalika Lombok. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia berpotensi menjadi pusat ekonomi halal dunia. Untuk mencapainya banyak hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah memantapkan logistik halal.

“Saya percaya semua dari kita berkomitmen menjalankan *Masterplan* Ekonomi Syariah demi mewujudkan Indonesia menjadi pusat ekonomi Syariah terkemuka di dunia.” Begitu harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat meluncurkan *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) di Kantor Bappenas, Mei 2019.

Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sudah seharusnya menjadi pusat halal (sebagai pengganti pusat syariah) dunia. Kini Indonesia sudah menjadi rumah bagi pasar ekonomi halal domestik. Dengan penduduk muslim 219 juta pada 2017,

“

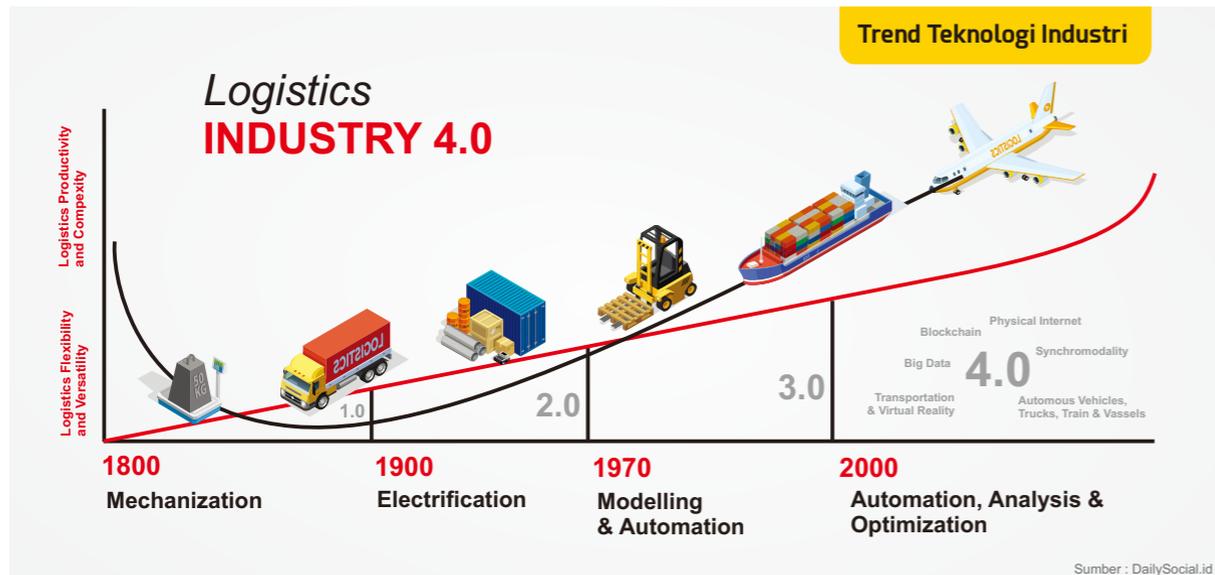
Pada prinsipnya logistik halal adalah proses penanganan arus bahan atau produk melalui rantai pasokan (supply chain) yang sesuai dengan standar halal. Fokus dari logistik halal adalah mendasarkan pada pemisahan (segregation) dan bukan pada deteksi atau kecurigaan semata. Pada posisi ini logistik halal akan memastikan konsistensi penanganan halal sebagaimana diharapkan masyarakat muslim.

”

pengeluaran produk dan layanan ekonomi halal menurut '*Indonesia Halal and Strategy Roadmap*' mencapai 218,8 miliar dolar AS, dan diproyeksikan 330,5 miliar dolar pada 2025.

Pasar besar tersebut sayangnya sebagian besar masih diisi oleh produk-produk asing. Indonesia masih menjadi pasar halal bagi masyarakat *global*. Ini menjadi tantangan, bagaimana pasar domestik halal kita kuasai, dan sekaligus mampu berekspansi ke pasar luar negeri. Jika itu bisa dilakukan, Indonesia akan segera menjadi pusat halal dunia. Berita menggembirakan adalah bahwa selama lima tahun terakhir ini Indonesia sudah mulai masuk dalam kancah bisnis halal *lifestyle* dunia. Dalam GIE (*Global Islamic Economy*) *Score 2019*, Indonesia sudah masuk dalam 10 besar dunia, dari sebelumnya diposisi urutan belasan. Masuknya ke urutan 10 besar didorong oleh meningkatnya peran Indonesia di kategori keuangan halal, wisata halal, dan *fashion*. Bahkan *fashion* ada pada urutan pertama.

Laporan yang dirilis *Global Islamic Finance Report* (GIFR) di 2019 juga menggembirakan dimana Indonesia berhasil mencatat skor 81,93 pada *Islamic Finance Country Index* (IFCI) 2019. Skor tinggi tersebut membuat Indonesia berada di peringkat pertama dalam pasar keuangan syariah *global*. Tahun lalu, Indonesia berada di peringkat keenam. Di bidang wisata halal, Indonesia juga memiliki daya jual tinggi. Bahkan pada 2015 silam, Lombok ditetapkan sebagai tujuan wisata halal terbaik di dunia dalam *World Halal Travel Award* di Abu Dhabi. Masih di sektor wisata, *Global Muslim Travel Index* (GMTI) menjadi standardisasi acuan Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik 2019. Indonesia unggul dari 130 destinasi dari seluruh dunia.



Berbagai penghargaan tersebut menambah keyakinan kita bahwa Indonesia bisa menjadi pusat halal dunia. Namun tentu saja perlu kerja keras. Sebagaimana banyak disuarakan oleh pemerhati ekonomi halal bahwa dedikasi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat bisnis halal masih tambal sulam. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana sekarang sudah ada BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) tetapi belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Logistik 4.0 Mampukah Mendorong Industri Halal?

Tidak ada yang abadi di dunia selain perubahan. Di dunia industri pun senantiasa terjadi perubahan. Perubahan itu didorong oleh keinginan manusia untuk menjadikan industri lebih efektif dan efisien. Dan kini dunia industri sudah memasuki babak baru yakni Industri 4.0.

Revolusi industri telah membuat *landscape* bisnis berubah dari waktu ke waktu. Revolusi Industri 1.0 dimulai dengan ditemukannya mesin mekanik dimana beberapa

tugas manusia dan binatang digantikan dengan mesin.

Penemuan mesin yang digerakkan oleh air dan mesin uap menjadi bintang dalam Industri 1.0. Periode Industri 1.0 berlangsung 1750-1830. Revolusi Industri 2.0 ditandai dengan era produk massal yang dihasilkan oleh mesin yang digerakkan oleh listrik. Icon dari era ini adalah ban berjalan dalam merakit produk yang menandakan banyaknya *output* yang dihasilkan. Periodisasi era ini adalah 1870-1900. Berikutnya pada Revolusi Industri 3.0, didorong oleh teknologi otomatisasi dan komputasi. Kebutuhan terhadap

“

Revolusi industri terjadi dari waktu ke waktu. Negara yang lengah mengantisipasinya akan semakin ketinggalan jauh. Teknologi informasi sudah menjadi bagian penting dari kemajuan ekonomi sebuah negara. Karena itu, Indonesia pun harus bersiap untuk menyatu dalam Revolusi Industri 4.0.

”

tenaga manusia semakin sedikit karena teknologi dan komputer mampu membuat banyak pekerjaan lebih efisien. Mulai pula adanya robot yang menggantikan tenaga manusia dan kegiatan lain yang sudah mengandalkan mesin. Era ini dimulai 1960-2000an.

Terakhir yang sekarang melanda adalah Industri 4.0. Robot yang digerakkan oleh *artificial intelligence* semakin mewabah, dan hebatnya mesin robot itu sudah saling komunikasi memanfaatkan jaringan internet. *Big Data*, digitalisasi, dan *internet of things* menjadi bagian tak terpisahkan. Revolusi industri terjadi dari waktu ke waktu. Negara yang lengah mengantisipasinya akan semakin ketinggalan jauh. Teknologi informasi sudah menjadi bagian penting dari kemajuan ekonomi negara. Karena itu, Indonesia pun harus bersiap untuk menyatu dalam Revolusi Industri 4.0.

Dalam menghadapi Revolusi Industri ini Indonesia menyusun *roadmap* dan strategi untuk mengantisipasinya. Untuk itu pemerintah meluncurkan *Making Indonesia 4.0* yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada

4 April 2018. Langkah awal dalam menjalankan program tersebut dipilih lima industri yang menjadi fokus implementasi Industri 4.0 di Indonesia, yaitu makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik dan kimia.

Lima industri tersebut selama ini telah berkontribusi besar terhadap PDB dan memiliki daya saing tingkat internasional. Kelimanya merupakan tulang punggung industri dan diharapkan membawa pengaruh yang besar dalam daya saing. Kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia diharapkan mendorong Indonesia menuju 10 besar ekonomi dunia di 2030.

Untuk mendukung keberhasilan Industri 4.0 tersebut, seluruh sektor harus bergerak bersama, tidak hanya lima sektor yang menjadi fokus pemerintah. Industri logistik tak terkecuali. Dengan mengacu pada filosofi dasar Industri 4.0, maka industri logistik akan lebih efisien jika konsisten mengakomodasi Industri 4.0. Dan kini sudah muncul istilah *Logistic and Supply Chain 4.0*.

Logistik 4.0 merupakan integrasi logistik dan inovasi digital dengan penggunaan *information and communication of technology* (ICT) yang didukung oleh *cyber-physical system* (CPS). CPS adalah sistem yang memungkinkan terhubungnya alat yang berbentuk fisik dengan jaringan internet. Bahkan sistem ini pun memungkinkan adanya kontrol dan respon dari internet kepada mesin berbentuk fisik melalui alat kendali yang dapat dikontrol dari jarak jauh dan sensor.

Dengan Logistik 4.0 maka akan terbentuk jaringan rantai pasok global dimana *stakeholder* terkoneksi dan berinteraksi menggunakan internet. Semua kegiatan *inbound logistics* dikelola dan dikendalikan secara *real time* menggunakan internet.

Kegiatan *intra logistics* dilakukan sepenuhnya secara otomatis dan terprogram sesuai dengan prediksi *inbound* dan *outbound* logistiknya. Tidak memerlukan pergudangan, *inventory* dikelola secara *just in time* (*no warehousing in supply chain*). Sarana transportasi dengan menggunakan *drone* yang terprogram menggunakan *platform* internet (Titi Indrawati, 2019).

Lantas di era *Internet of Things* ini, bagaimana Logistik 4.0 bisa mendorong semakin majunya industri halal? Ini menjadi pertanyaan menarik karena bagaimanapun industri halal juga berada pada pusaran Industri 4.0. Sejauh ini industri halal sudah berkembang dengan pesat. Jika dulu ketika bicara tentang ekonomi Syariah atau ekonomi Islam hanya berputar di sektor keuangan, kini sudah mewabah ke industri lain yang sifatnya halal *lifestyle* seperti kosmetik, *fashion*, wisata, makanan dan media rekreasi.

Dari lima sektor yang menjadi fokus pemerintah dalam Industri 4.0, yang paling banyak bersentuhan dengan industri halal adalah makanan dan minuman, tekstil, dan kimia. Meski begitu bukan berarti sektor halal yang lain diabaikan. Justru untuk menggerakkan halal secara keseluruhan semua sektor harus digerakkan bersama agar terjadi sinergi yang optimal.

Peran Logistik 4.0 kelak akan semakin sentral dalam pengembangan industri halal. Karena bagaimanapun akan semakin efisien dan *terdelivery* secara lebih tepat dan cepat di masyarakat, Logistik 4.0 menjadi salah satu kunci perkembangan industri logistik kedepan. Di sisi lain pemain industri halal juga harus menerapkan filosofi industri 4.0 agar terjalin frekuensi dan semangat yang sama antara pelaku industri logistik di Indonesia.

“Saya percaya semua kita berkomitmen menjalankan Masterplan Ekonomi Syariah demi mewujudkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.”

Presiden Joko Widodo



HALAL LOGISTIK SEKTOR INDUSTRI YANG MENJANJIKAN



Budi Santosa Chulasoh

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia,
Chapter Jawa Barat

Industri Logistik Indonesia diperkirakan akan semakin berkembang pada tahun 2020. Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi penduduk, perbaikan infrastruktur, serta investasi asing yang masuk di Indonesia. Menurut Lembaga Konsultan Internasional, Frost & Sullivan, prediksi industri logistik Indonesia akan tumbuh 15,4% dengan nilai Rp 4.396 triliun.

Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi digital dalam industri logistik yang semakin menunjukkan eksistensinya untuk dapat menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat pengguna jasa logistik. Dilain sisi perhatian industri juga terfokus kepada *trend* halal (*halal lifestyle*) yang berkembang di Indonesia dan juga sudah masuk

dalam ranah industri logistik. Halal logistik menarik perhatian masyarakat dan menjadi potensi *market* tersendiri bagi pelaku industri logistik di Indonesia. Melihat geliat industri logistik yang sangat menjanjikan pada tahun 2020 ini, tim KNEKS Insight berhasil melakukan wawancara dengan salah satu pengurus Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Bapak Budi Santosa Chulasoh untuk mengetahui lebih detail terkait perkembangan dan prospek kedepan industri logistik di Indonesia.

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) merupakan organisasi profesi nirlaba di bidang Supply Chain & Logistics Management (SC&LM) dan menjadi wadah strategis bagi para pelaku usaha logistik di Indonesia.

Dapat Bapak ceritakan awal mula berdirinya ALI, maksud serta tujuannya bagi industri logistik di Indonesia?

Asosiasi Logistik Indonesia pada awalnya didirikan karena *trend* industri *global* yang semakin lama menunjukkan bahwa peran Manajemen Rantai Pasokan & Logistik dalam perusahaan menjadi semakin penting untuk mempertahankan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan.

Di Indonesia, terutama setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi, *trend* fokus SCM & Logistik ini semakin diterima dengan baik oleh industri. Ketika banyak perusahaan berada pada tahap tertentu dengan tingkat profitabilitas yang stagnan dan rendah, di sisi lain pendapatan penjualan tumbuh melambat karena daya saing yang semakin meningkat menimbulkan perhatian pada perusahaan untuk memperhatikan fungsi manajemen rantai pasokan dan logistik pada perusahaan.

Hal ini tentu akan berdampak dalam mengurangi biaya operasional sehingga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Pada saat itu banyak perusahaan memulai program strategis terkait dengan peningkatan pada SCM & Logistik. Sejalan dengan hal tersebut berbagai konsultan manajemen mempromosikan *trend* SCM dan logistik ke industri dan pada saat yang bersamaan kualifikasi sumber daya manusia yang berkualitas di bidang SCM & Logistik telah berkembang sangat pesat.

Atas dasar itu didirikanlah Asosiasi Logistik Indonesia pada kuartal terakhir tahun 2002 yang pada dasarnya merupakan organisasi nirlaba untuk profesi *Supply Chain & Logistic* di Indonesia. Namun, ALI dibuka untuk kenggotaan publik pada bulan Januari tahun 2003. Asosiasi Logistik Indonesia tidak

hanya beranggotakan praktisi dan akademisi, namun juga regulator maupun pengamat di bidang manajemen rantai pasokan dan logistik. Pada Desember 2009, jumlah anggota yang terdaftar mencapai lebih dari 3.000 profesional yang terdiri dari praktisi, akademisi, regulator, dan mereka yang memiliki minat dalam bidang ini. Praktisi datang dari berbagai industri, yaitu produsen, penyedia logistik, distributor, pedagang, pengecer, minyak & gas dan sektor lainnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.500 pulau yang membentang seluas 1.905 juta kilometer persegi. Dengan keadaan geografis dan demografi yang unik ini, Indonesia memiliki tantangan yang serius dalam mengembangkan industri logistiknya. Menurut Bapak apa tantangan lain dan peluang tentunya dalam pengembangan industri logistik di Indonesia, serta bagaimana dukungan pemerintah terhadap industri logistik di Indonesia?

Tantangan dan peluang dalam pengembangan industri logistik di Indonesia terkait dengan struktur geografis wilayah

“

Pemerintah pada dasarnya telah menyiapkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yakni UU No.33 Tahun 2014 dengan segera menerbitkan peraturan pelaksanaannya dan regulasi lainnya. Namun pemerintah juga sebaiknya segera membangun infrastruktur industri halal seperti pelabuhan, kargo udara, kawasan industri dan logistik halal seperti yang saat ini telah dan sedang dibangun oleh Malaysia, Singapura, Brunei, Cina Taiwan, Korea Selatan, Jepang dan Thailand.

”

adalah penggunaan transportasi multimoda yang menggabungkan metode transportasi yang berbeda untuk menjangkau daerah terpencil.

Hal ini terkait dengan kebutuhan akan layanan yang dapat mencakup proses hulu hingga hilir meliputi infrastruktur transportasi, kargo, konsolidasi hingga pergudangan. Penerapan *last miles delivery* contohnya dapat diterapkan untuk menjangkau pelanggan pada daerah terpencil hingga penggunaan gudang pada masyarakat yang memiliki bangunan yang tidak terpakai merupakan beberapa solusi konkret dalam rangka menekan biaya logistik yang tinggi. Apabila hal tersebut sudah diimplementasi kemudian baru beberapa teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* baru dapat terlaksana dengan optimal pada logistik dan rantai pasok. Tentu saja hal ini memerlukan dukungan dari pemerintah sebagai regulator.

Pemerintah pada dasarnya telah menyiapkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yakni UU No.33 Tahun 2014 dengan segera menerbitkan peraturan pelaksanaannya dan regulasi lainnya. Namun pemerintah juga sebaiknya segera membangun infrastruktur industri halal seperti pelabuhan, kargo udara, kawasan industri dan logistik halal seperti yang saat ini telah dan sedang dibangun oleh Malaysia, Singapura, Brunei, Cina Taiwan, Korea Selatan, Jepang dan Thailand.

Negara-negara tersebut sangat serius menciptakan infrastruktur industri halal guna mendorong peningkatan pangan dan produk halal mereka untuk masuk di pasar *global*. Pemerintah dalam hal ini idealnya melakukan rancangan pada Undang-Undang Logistik (UU Log) sebagai *umbrella act* (payung hukum). UU Log diharapkan menjadi regulasi yang

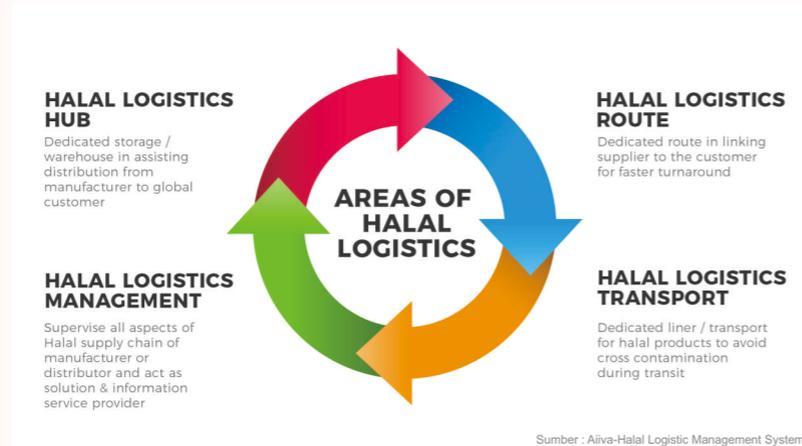
memiliki “figure” ideal. Regulasi yang ramping, sederhana (efisien), tertib (rapi), konsisten, dan efektif (implementasi, *law enforcement*). Apabila Omnibus Law di bidang logistik ini terealisasi maka responsivitas dan progresivitas hukum dalam rangka mengintegrasikan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan *stakeholders* (pemerintah, pelaku usaha, praktisi, asosiasi, akademisi, dan masyarakat luas).

Trend produk halal saat ini menjadi sorotan dalam dunia industri, tak terkecuali sektor-sektor bisnis yang berkenaan dengan rantai pasok produk halal, salah satunya adalah logistik. Dapat Bapak jelaskan bagaimana konsep penerapan halal dalam industri logistik khususnya yang ada dan akan diterapkan di Indonesia?

Konsep penerapan produk halal sendiri pada dasarnya mengacu pada syariat Islam dengan kriteria halal zatnya yaitu produk yang halal menurut zatnya adalah produk yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi, dan telah ditetapkan kehalalannya dalam Al Quran dan Hadits, halal cara memperolehnya yaitu produk yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah.

Produk akan menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan jalan yang batil karena itu bisa merugikan orang lain dan dilarang oleh syariat, serta halal cara pengolahannya yaitu produk yang semula halal dan akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama. Banyak sekali produk yang asalnya halal, tetapi karena pengolahannya yang tidak benar menyebabkan makanan itu menjadi haram.

Pada kriteria cara pengolahannya mensyaratkan adanya proses produk halal, yang mencakup rangkaian kegiatan untuk



menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Hal ini mengacu pada suatu sistem rantai pasok yang menjamin proses produk halal.

Di Indonesia pengakuan kehalalan suatu produk dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berdasarkan *fatwa* halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI dengan memberikan sertifikasi produk halal. Tanda kehalalan suatu produk ditunjukkan dengan pemberian label halal. Konsep logistik halal pada dasarnya mengacu pada proses mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan, dan penanganan material, ternak, dan persediaan barang setengah jadi baik makanan dan bukan makanan bersama dengan informasi terkait dan aliran dokumentasi melalui organisasi perusahaan dan rantai pasok yang patuh terhadap prinsip-prinsip umum syariah (*Malaysia Institute of Transport*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tieman, Vorst, dan Ghazali (2012) menjelaskan prinsip-prinsip dalam logistik halal bahwa produk halal dipisahkan

dari produk *non-halal* untuk menghindari kontaminasi, menghindari kesalahan, menjamin konsistensi dengan Syariah dan harapan pelanggan muslim.

Untuk pengembangan produk halal di Indonesia saat ini masih pada tahap sertifikasi dan pemberian label halal pada produk halal. Pengembangan logistik halal di Indonesia perlu diarahkan untuk sertifikasi logistik halal dalam sistem rantai pasok secara menyeluruh mulai dari pengadaan bahan baku, pergudangan, transportasi, dan distribusi, kemudian dikembangkan pada rantai nilai produk halal dengan membangun kawasan “*halal logistics park*”, kewirausahaan produk halal, kawasan “industri dan UKM produk halal”, dan pengembangan ekspor produk-produk halal, serta dukungan dari sistem keuangan atau perbankan Syariah dalam pembiayaan produk-produk halal.

Hampir seluruh instrumen industri yang mengedepankan kehalalan produk harus memiliki sertifikat halal dari lembaga yang berhak untuk mengeluarkan sertifikasi tersebut, dalam hal ini MUI dan BPJPH. Berdasarkan hal ini bisa Bapak jelaskan kenapa perusahaan logistik perlu atau

harus sertifikasi halal? Apakah permintaan pasar untuk logistik halal di Indonesia cukup tinggi?

Perusahaan logistik perlu untuk menerapkan sertifikasi halal dikarenakan tingginya permintaan akan produk halal baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, dalam beberapa tahun mendatang permintaan akan produk halal semakin meningkat, tidak hanya karena populasi penduduk muslim di Indonesia yang besar dan kesadaran akan menjalankan ajaran agama semakin meningkat, namun juga didorong oleh beberapa faktor antara lain: pasar bebas, perdagangan lintas negara, keterbukaan investasi bagi negara asing dan peningkatan ekonomi halal di seluruh dunia.

Hal ini mengacu pada laporan *Global Islamic Economy Indicator* 2018/2019, Indonesia berada di posisi ke 10 di dunia sebagai negara yang menggunakan sistem ekonomi Syariah. Misalkan, di sektor makanan dan minuman halal, penduduk muslim dunia menghabiskan USD1,30 triliun pada tahun 2017 untuk makanan halal, dimana Indonesia telah menjadi konsumen makanan halal terbesar di dunia dengan menghabiskan USD170 miliar.

Potensi ini merupakan kesempatan sekaligus tantangan yang besar untuk meningkatkan investasi dan produk makanan tersertifikasi halal di Indonesia. Berdasarkan sumber lain yang didapat dari *State Global Economy Report* tahun 2018/2019 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan pengeluaran muslim untuk makanan halal tertinggi di dunia. Tercatat bahwa muslim di Indonesia mengeluarkan 2.465 triliun, bahkan mengalahkan negara-negara muslim seperti Turki ± 1.700 triliun, Pakistan ± 1,600 triliun, Mesir ± 1,200 triliun, Iran ± 800 triliun, dan Arab Saudi ± 700 triliun.

Melihat peluang yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia bisa menjadikan dirinya sebagai *regional and global halal hub* untuk produksi dan perdagangan halal. Upaya untuk mendorong industri halal melalui penguatan rantai nilai halal yang merupakan salah satu strategi untuk mendorong Indonesia menjadi pemain *global halal hub*.

Strategi penguatan rantai nilai halal ini perlu didukung oleh pemetaan kluster industri halal, yang dapat dimulai dengan proses pemetaan jalur logistik yang efisien dan efektif.

Di sisi lain bagi perusahaan yang menerapkan sertifikasi halal akan mendapatkan beberapa benefit seperti dapat meningkatkan kemampuan pemasaran untuk ekspor ke negara-negara muslim lain seperti Arab Saudi, Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara lainnya. Apalagi dengan Indonesia yang bermayoritas muslim, pastinya akan lebih dipercaya dan disegani oleh negara ataupun pasar muslim. Perusahaan logistik juga dapat memiliki *unique selling point* untuk dapat melakukan penanganan pada produk halal sehingga menjadi nilai tambah dibandingkan perusahaan lain yang tidak menerapkan sertifikasi halal.

Pemerintah saat ini sangat mendukung tumbuh kembangnya industri logistik di Indonesia, khususnya halal logistik. Bagaimana harapan Bapak sebagai praktisi di sektor logistik terhadap KNEKS dalam mendukung kemajuan dan berkembangnya logistik halal di Indonesia?

Harapan saya ke depan terhadap KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) dalam mendukung kemajuan dan tumbuh kembangnya sektor logistik halal di Indonesia adalah dengan segera

“

Berdasarkan sumber dari *State Global Economy Report* tahun 2018/2019 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan pengeluaran muslim untuk makanan halal tertinggi di dunia. Tercatat bahwa muslim di Indonesia mengeluarkan 2.465 triliun, bahkan mengalahkan negara-negara muslim seperti Turki ± 1.700 triliun, Pakistan ± 1,600 triliun, Mesir ± 1,200 triliun, Iran ± 800 triliun, dan Arab Saudi ± 700 triliun. Melihat peluang yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia bisa menjadikan dirinya sebagai *regional and global halal hub* untuk produksi dan perdagangan halal. Upaya untuk mendorong industri halal melalui penguatan rantai nilai halal merupakan salah satu strategi untuk mendorong Indonesia menjadi pemain *global halal hub*. ”

mungkin menciptakan ekosistem industri halal yang saling berkolaborasi antar entitas sehingga Indonesia dapat sesegera mungkin menerapkan logistik halal agar menjadi negara utama dalam industri halal dunia. Hal ini tentu dilakukan dengan sesegera mungkin merancang cetak biru pengembangan logistik halal sebagai rencana induk pengembangan logistik halal di Indonesia.

Dalam cetak biru pengembangan logistik halal juga nantinya meliputi beberapa isu seperti koordinasi, kelembagaan, kebijakan dan regulasi, pengembangan industri, edukasi masyarakat, integritas halal, sektor prioritas, teknologi, kompetensi SDM dan penelitian serta pengembangan. Hal ini tentu saja memerlukan keterlibatan dari banyak pihak mulai dari pemerintah, penyedia jasa logistik, produsen, pengecer, lembaga hingga konsultan untuk melakukan kajian-kajian pada bidang tersebut.

MELIHAT POTENSI INDONESIA DALAM MENGEMBANGKAN HALAL LOGISTIK



Raden Didiet Rachmat Hidayat

Dosen, Peneliti dan Pengamat Logistik Halal

Gaya hidup halal kini tengah menjadi *trend global*. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah populasi penduduk muslim dunia yang mencapai lebih dari 1,8 milyar atau setara dengan 24 persen dari total populasi penduduk dunia. Selain itu, produk-produk halal tak lagi hanya dikonsumsi oleh umat muslim, maupun negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, sebagai salah satu pemenuhan standar hukum syariah, tetapi juga oleh semua kalangan termasuk negara yang umat muslimnya minoritas.

Berdasarkan data dari *Global Islamic Economy Report*, nantinya pada tahun 2023 perkembangan industri halal di Indonesia akan semakin meningkat, terutama dari sektor makanan dan minuman halal, fesyen halal, dan pariwisata halal. Peningkatan sektor ini ditangkap baik oleh perusahaan logistik yang beroperasi dengan prinsip-prinsip

syariah dan turut menyumbangkan pertumbuhan terhadap industri halal. Untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait halal logistik dan prospek pertumbuhannya kedepan, tim KNEKS Insight melakukan wawancara kepada salah seorang pengamat logistik halal yaitu Bapak Raden Didiet Rachmat Hidayat.

Meningkatnya *trend* industri halal dunia sudah ditangkap oleh sektor industri logistik dimana Indonesia sendiri berkontribusi sekitar 10% dari total USD2,1 triliun nilai ekonomi halal dunia (GIER 2018/2019). Saat ini sudah ada sekitar 8 perusahaan logistik halal di Indonesia yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melihat fenomena ini, dapat Bapak jelaskan dengan lebih rinci tentang apa itu logistik halal baik secara konsep dan implementasinya dalam industri?

Sesuai dengan teori *supply chain management council* sektor logistik sendiri terbagi menjadi tiga, yakni transportasi, *warehousing* (gudang), dan distribusi. Yang membedakan, dengan sektor transportasi distribusi memiliki unsur pemasaran. Tiga sektor inilah yang diadopsi di Indonesia. Logistik tersebut yang dinamakan dengan logistik konvensional. Lain halnya dengan logistik halal. Logistik halal harus memiliki sertifikasi halal. Baik dari sisi transportasi, jasa pergudangan, hingga jasa distribusinya.

Saat ini, sudah ada sekitar 8 perusahaan logistik halal di Indonesia. Kunci dari logistik halal adalah sertifikat. Semuanya harus memiliki sertifikat halal. Mulai dari transportasi, pergudangan, hingga distribusinya. Semuanya harus disertifikasi halal. Misalnya begini, 'Pak, ini ada dua produk roti, mana yang halal? Ya, pasti yang memiliki sertifikat halal. Kan kita bukan ahli roti dan nggak tau bahan-bahan *raw material* untuk membuatnya, kita hanya memercayakan pada sertifikat halalnya. Contoh lainnya kalau kita mau bikin gedung, yang bisa bikin kan insinyur, kita tinggal menyerahkan ke ahlinya. Sama halnya dengan sertifikasi halal, tinggal diserahkan ke auditor.'

Bisa disimpulkan bahwa konsep logistik halal adalah logistik konvensional yang telah memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang saya lakukan dan sudah dipresentasikan dalam konferensi internasional. Konsep ini juga membantu mempermudah pemahaman terhadap logistik halal.

Dalam memberikan sertifikasi halal ada pihak yang telah ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Undang-Undang (UU), yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya surat dari Kemenag,

bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekarang saya lihat juga ada Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang ditunjuk Sucofindo. Pada praktiknya, semakin banyak LPH semakin bagus. Tidak ada masalah. Semuanya bisa saling bersinergi.

Terkait implementasi, tidak jauh beda dengan logistik konvensional. Hanya saja, distribusi logistik halal tidak boleh terkontaminasi dengan bahan-bahan atau material *non-halal*. Misalnya, daging ayam yang sudah disembelih secara halal, tidak boleh diangkut bersama dengan daging babi. Sementara untuk jenis alat pengangkutnya masing-masing boleh sama. Misalnya begini, ini ada dua roti. Yang satu halal, satunya lagi mengandung babi. Bentuk rotinya sama, apa yang membedakan? Ya, sertifikat halalnya. Jadi, implementasinya sama saja. Tidak ada bedanya. Hanya saja logistik halal nilai kompetitifnya tinggi karena *niche market*-nya bersertifikasi halal. Karena logistik halal menjamin jasa yang diberikan sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan, yakni halal *guideline*-nya dari LPPOM MUI.

Jadi, di sepanjang rantai pasok halal, dibedakan menjadi tiga jenis: produk, proses, dan logistik. Sengaja saya pisahkan logistik dari proses, supaya jelas. Orang kan kebanyakan melihat produk dan proses, sementara logistik berada di dalam proses. Makanya saya bedakan produk, proses, dan logistik. *Once finished goods* keluar dari pabrik, akan didistribusikan melalui jasa *tracking*, jasa gudang, dan lain-lain, itu yang menjadi *the weakness link*, titik lemah. Kita kan nggak tau truknya sudah bersertifikat halal atau belum, kita percaya saja, kan? Padahal, secara konseptual halal *supply chain* menurut Marco Tiemen, harus ada konfirmasi dari ujung ke ujung

“Berdasarkan data dari *Global Islamic Economy Report*, nantinya pada tahun 2023 perkembangan industri halal di Indonesia akan semakin meningkat, terutama dari sektor makanan dan minuman halal, fesyen halal, dan pariwisata halal. Peningkatan sektor ini ditangkap baik oleh perusahaan logistik yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah dan turut menyumbangkan pertumbuhan terhadap industri halal.”

halal. Pabriknya halal, prosesnya halal, truknya halal, distribusinya halal, gudangnya juga halal, harus ada konfirmasi, semuanya ada di sertifikat.

Jika dilihat dari data yang ada, Indonesia saat ini hanya memiliki delapan perusahaan logistik. Jumlah ini masih kalah jauh dengan Malaysia yang memiliki 51 perusahaan logistik. Sementara bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, rasionya masih kalah jauh. Jumlah penduduk Malaysia hanya 51 juta, sementara Indonesia populasinya lebih dari 250 juta. Ini yang disebut sebagai *the weakness link*. Potensi bisnis logistik halal masih sangat bagus.

Saya pernah ikut pemaparan KNEKS, menurut saya, konsep logistik ini perlu diperdalam lagi, tidak hanya sebatas produk proses saja. Misalnya Rumah Potong Hewan (RPH). Dari segi proses dan *raw material*-nya aman, yakni sapi. Selanjutnya pasti butuh proses distribusi dan penyimpanan. Bagaimana dengan gudangnya? Harus ada kepastian sertifikasi halalnya.

Awareness Indonesia terhadap logistik halal masih kurang bila dibandingkan dengan negara lain yang *notabene* umat muslimnya minoritas. Jepang misalnya,

negeri matahari terbit tersebut sudah memiliki gudang halal yang dimiliki Nippon Express. Singapura juga tak mau kalah. Perusahaan OIFC milik Singapura juga sudah mempunyai gudang halal. Bagi mereka, ini adalah masalah bisnis, bukan urusan agama semata. Karenanya, saya lebih menyukai penggunaan istilah ekonomi Syariah dibandingkan dengan keuangan syariah, karena cakupannya yang lebih luas.

Menurut Indonesian Logistics Community (ILC), Indonesia memiliki potensi menjadi pusat bisnis halal dunia termasuk pada sektor logistik. Terlebih secara regulasi pemerintah telah memiliki Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Bagaimana potensi atau peluang sektor Logistik Halal ke depan?

Jika dilihat dari sejarahnya, konsep sertifikasi halal bermula dari Malaysia. Saat ini, Malaysia menjadi rujukan utama sertifikasi halal *global*. Indonesia sendiri berada di urutan kedua setelah Malaysia dalam menerapkan sertifikasi halal diikuti Selandia Baru.

Jepang membidik potensi *market* ini secara *global*. Mereka sudah melakukan riset. Lihat saja, Indonesia sendiri potensinya masih sangat besar. Posisinya baru di urutan ke-8.

Tantangannya? Yang pertama adalah *awareness*. Industri halal itu bisa jadi bisnis bagi *non-Muslim*, sementara bagi umat Islam sendiri industri halal adalah bisnis dan religi. Titik singgungnya ada di bisnis, karenanya disebut industri dan pelaku industri. Jika industri ini diberi sosialisasi yang mumpuni, para pelakunya semakin *aware*. Prinsip marketing itu AIDA: *Awareness (attention), Interest, Desire, Action*. Di Malaysia, semua industri halal dipegang pemerintah. Termasuk sosialisasi yang

mendapat dukungan dari KADIN Malaysia. Saat kita di Malaysia, kita bisa lihat semua *channel* televisi Malaysia turut menyosialisasikan industri halal. Malaysia sangat masif dan sistematis. Jadi, tantangan di Indonesia sendiri ada di pemerintah dibantu masyarakat yang harus turun tangan untuk mendukung industri halal. *Awareness* kita harus masif, sistematis, dan terstruktur.

Tantangan lainnya pandangan masyarakat yang menyebut islamisasi terselubung. Padahal tujuan utamanya adalah bisnis. Kalau ada islamisasi terselubung pasti tidak akan ada Marco Tieman. Toh, sampai saat ini dia masih Kristen. Saya sempat bertemu beberapa waktu lalu. Karena industri halal titik irisannya di bisnis, kita bisa mengutip ungkapan Voltaire: "Di dalam bisnis semua agama sama". Kalau urusan uang, semua agama sama. Tauhidnya boleh beda, tapi uangnya sama.

Sementara di Indonesia sendiri melihat Marco Tieman ini aneh. Orang Kristen kok mau bisnis halal. Padahal, tujuannya memang uang. Menurut saya, *awareness* itulah yang harus dibangun. Industri halal ini meskipun kewajiban bagi umat muslim, tapi uangnya mengalir ke mereka yang *non-muslim* juga. Jadi, potensinya masih sangat besar. Apalagi yang bilang orang asing.

Tantangan kedua adalah infrastruktur. Secara Undang-Undang, Indonesia sudah punya meskipun ada wacana di Omnibus Law. Infrastruktur termasuk gudang dan transportasi yang belum disertifikasi. Asing berlomba-lomba masuk ke Indonesia. Stigma negatif masih terkait logistik halal yang kurang menguntungkan masih melekat, terutama soal *cost*. Padahal, kalau tidak menguntungkan, mengapa orang Jepang mau ke Indonesia.

Ini berarti mereka sudah mengambil ancang-ancang. Memangnya, membangun jembatan dalam sehari bisa selesai seperti Bandung Bondowoso?

Membangun infrastruktur itu lama. Ini konsep investasi. Begitu jadi, hasilnya bisa dinikmati dalam jangka panjang. Sekali lagi ini masalah *awareness*. Harus ada *mindset* bisnis dalam industri halal.

Apa strategi dan langkah produktif yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha logistik dalam rangka merespon pasar berbasis teknologi ke depan, melihat trend perkembangan teknologi industri semakin menjanjikan?

Saya dapat dari Marco Tieman. Sekarang kan, ada *blockchain*. Saat kita makan mie ayam di restoran X, kita bisa langsung tau infonya saat *scan barcode*. Ayamnya dipotong di mana? Secara syariah atau bukan? Gudangnya sudah tersertifikasi atau belum? Bagaimana dengan distribusinya? Sudah halal atau belum. Termasuk informasi tepung yang dipakai. Bagaimana dengan sayur yang dipakai. Apakah pupuknya sudah memenuhi standar. Informasi lengkap kehalalannya ini bisa kita dapatkan dengan mudah. Dari ujung ke ujung sesuai, kata Marco Tieman.

Dalam jurnalnya terdapat informasi lengkap. Kita tidak perlu datang ke peternakannya. Semua bisa dibantu dengan teknologi. Ini yang harus dibangun pemerintah, membangun infrastruktur termasuk teknologi *blockchain*. Semua pihak harus mengumpulkan data ke pemerintah karena pemerintah yang memiliki kewenangan.

Adakah negara yang sudah menggunakan teknologi *barcode*? Belum ada. Ini yang harus dipermudah. Termasuk *apply* sertifikat halal *e-commerce*.

“

Pemerintah harus memiliki BUMN khusus IT. IT-nya bisa digunakan juga untuk jasa logistik konvensional, sehingga bisa mendapatkan keduanya. Logistik halal tidak akan berkembang tanpa adanya logistik konvensional. Keduanya harus maju karena merupakan bagian dari ekosistem.

”

”

Sesungguhnya, konsep logistik seperti ini menaikkan kualitas dan menurunkan *cost*.

Di era revolusi Industri 4.0 saat ini, bagaimana konsep logistik halal bisa diintegrasikan ke dalam aspek teknologi agar mempunyai added value?

Konsepnya tidak bisa terpisah dari rantai pasok halal. Tidak boleh terpotong. Kan *supply chain* itu kan arus barang, arus uang, arus data. Ketiganya harus saling terkait. Ini harus dibantu teknologi. Secara teori mudah, tapi pelaksanaannya yang susah dan butuh investasi besar yang harus ditanggung pemerintah. Saya hanya bisa menyarankan, pemerintah harus memiliki BUMN khusus IT. IT-nya bisa digunakan juga untuk jasa logistik konvensional, sehingga bisa mendapatkan keduanya. Logistik halal tidak akan berkembang tanpa adanya logistik konvensional. Keduanya harus maju karena merupakan bagian dari ekosistem.

Apa harapan Bapak sebagai pengamat halal logistik terhadap KNEKS dalam mendukung kemajuan dan tumbuh kembangnya sektor logistik halal di Indonesia?

Menurut Marco, ada empat fase dalam mengembangkan industri halal: *Moslem Company, Halal Product,*

Halal Supply Chain, dan Halal Value Chain. Saat ini yang harus dibangun adalah *halal supply chain*. *Masterplan* sudah dibuat hingga 2024. Bisa kita lihat, berapa pertumbuhan jumlah perusahaan logistik setiap bulannya. Sekarang sudah bulan ketiga tahun 2020. Silakan kita buka website atau tanya MUI. Berapa penambahan jumlah perusahaan logistik halal. Kalau pun bertambah sepuluh berarti totalnya baru ada 18. Bagaimana dengan Malaysia? Apakah jumlah perusahaan mereka juga tidak bertambah?.

Jadi, menurut hemat saya, *halal value chain* itu bagus. Sangat ideal, tetapi seharusnya yang harus dibangun dulu adalah *halal supply chain* baru *halal value chain*. Kalau mau membangun *halal value chain* sesuai Meksik 2019-2024, kita harus bekerja keras. KNEKS harus bekerja seminggu tujuh hari tanpa libur. KNEKS tidak bisa bekerja sendirian.

Jadi, kalau menurut Marco Tieman, anggaphlah kita masih berada di *halal supply chain* yang sedang menuju *halal value chain*. KNEKS harus bekerja ekstra keras dan tidak bisa sendirian. Berapa budget yang dimiliki KNEKS? Misalnya untuk sosialisasi, bayar iklan lewat media TV dalam acara *prime time* yang menyelipkan *awareness halal industry* dan sebagainya. Cukupkah? Kita harus realistis. Semuanya tidak cukup dengan workshop, seminar, sosialisasi yang sistematis, terstruktur, dan masif.

Menurut hemat saya setelah bicara dengan Malaysia, media paling ampuh untuk mengenalkan *awareness* industri halal adalah TV. Orang yang tidak punya TV bisa menonton TV melalui HP. Yang agak lebih murah adalah media sosial, tapi KNEKS harus punya tim khusus yang punya *background* media sosial. Ini baru sebatas logistik, belum produk, Rumah

Potong Hewan (RPH), gudang, dan sebagainya. Ide kita terlalu besar, tapi yang menjalankan negara lain.

Khususnya Malaysia, ambisinya sangat besar. Bahkan, Olimpiade 2020 di Jepang terlepas dari kasus virus Corona, Malaysia menjadi satu-satunya *supply* makanan halal. Mengapa Jepang tidak pesan ke Indonesia? Jepang melihat Indonesia baru memiliki delapan perusahaan logistik halal. Kalah jauh dengan Malaysia. Ibaratnya, untuk *supply* kebutuhan dalam negeri saja masih belum cukup.

Harapan saya terkait logistik halal, industri ini membutuhkan sertifikasi halal. Ini berkaitan dengan auditornya. Namun, kita masih kekurangan auditor halal. Dari total 25 ribu auditor halal yang dibutuhkan, kita baru punya dua ribu. Itupun, tidak semua *full time*. Mengapa demikian? Hal ini terkait UU yang menyebutkan syarat bagi auditor halal: WNI, muslim, dan syarat ketiga yang menjadi *bottle neck* yang agak susah dicari, minimal S1 lulusan dari pangan, *chemistry, bio chemistry*. Untuk melakukan audit depo kontainer dibutuhkan lulusan ini.

Bagaimana solusinya? Kalau ada tenaga SDM yang sudah 20 tahun bekerja di depo container, bisa dilatih untuk menjadi auditor halal. Ini dari UU dan PP. Semoga *Omnibus Law* bisa mengatur lulusan S1 manajemen bisa menjadi auditor halal. Ini untuk membuka sumbat *bottle neck* tadi. Ini agar kebutuhan 25 ribu auditor halal bisa segera tercapai. Jangan sampai sudah ada ribuan perusahaan truk yang siap diaudit, tapi auditornya belum ada. Jadi, harapannya syarat tadi bisa diubah menjadi S1 Manajemen. Tantangannya ada di UU dan PP. Ini supaya menjadi perhatian KNEKS untuk mengembangkan ekonomi Syariah.



Merebaknya kasus virus Corona yang menyebabkan penyakit *Covid-19* berimbas pula pada sektor industri logistik. Dampaknya terutama terjadi pada arus barang ekspor dan impor Indonesia dengan Tiongkok. Sejatinya situasi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah bersama para pemangku kepentingan untuk menyusun cetak biru logistik halal nasional menuju Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Indonesia menjadi negara ke-10 yang menetapkan kebijakan penutupan sementara akses penerbangan dari dan ke Tiongkok untuk mengurangi risiko penyebaran virus Corona. Kebijakan ini menyebabkan ekspor jalur udara diperkirakan mengalami penurunan 40-60%. Tidak bisa dipungkiri, virus Corona memengaruhi kinerja ekspor pabrikan nasional karena Tiongkok merupakan mitra dagang utama pabrikan domestik. Meski jalur laut masih dimungkinkan untuk dilakukan pengiriman, namun pertumbuhan industri logistik nasional 2020 yang semula diprediksi tumbuh 9% diyakini akan sulit dicapai.

Kasus Corona menyadarkan tentang betapa pentingnya

pemahaman akan risiko rantai pasokan *global*. Aliran material dan produk sejatinya tersebar sangat luas, baik sumbernya (*sourcing* atau *origin*) maupun tujuan (*destination*), sehingga Indonesia tidak boleh bergantung hanya pada satu atau dua pemasok. Keberadaan logistik halal dibutuhkan untuk menjamin proses aliran material dan produk tersebut, mulai dari pemasok, pabrikan atau pengolah, distributor, pengecer, sampai ke konsumen akhir, harus dapat menjamin material serta produk tetap terjaga halal dan *thayyib* (higienis, bersih, dan berkualitas).

Karenanya, Indonesia perlu melakukan pengelolaan dan mitigasi risiko secara efektif, untuk memastikan bahwa material dan produk memenuhi kaidah halal, baik isi maupun proses di sepanjang rantai pasokannya. Di sinilah perlunya sistem rantai pasokan dan logistik halal.

Untuk itu, kasus Corona sejatinya dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyusun cetak biru logistik halal nasional. Logistik halal kerap kali dianggap bukan sebagai kebutuhan. Padahal, logistik halal sejatinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari industri halal. Sektor logistik memiliki andil dalam penciptaan

ekosistem halal. Untuk itu, dalam rangka menuju Indonesia sebagai pusat halal dunia, maka memiliki cetak biru logistik halal nasional menjadi keniscayaan dalam membangun ekosistem halal.

Urgensi logistik halal

The State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019 mencatat *market size* untuk seluruh industri halal global pada 2017 mencapai US\$2,107 triliun. Pada 2023, *market size* ini diprediksi meningkat menjadi US\$3,007 triliun. Meningkatnya *market size* produk halal *global* tidak hanya dilatarbelakangi oleh meningkatnya populasi muslim dunia saja, tetapi juga kesadaran masyarakat muslim untuk menjalankan ajaran agama yang semakin meningkat yang ditandai dengan kesadaran untuk memilih menggunakan produk halal.

Selain itu, masyarakat *non-muslim* yang memilih produk halal juga semakin meningkat. Itulah sebabnya, halal kini tidak lagi menjadi simbol agama semata dan telah menjadi standar dalam menentukan tingkat kebersihan, keamanan serta kenyamanan yang diakui masyarakat *global*. Halal telah melampaui batas ras, agama, dan negara. Dalam ketidakpastian ekonomi global,

produk halal memiliki peluang pasar yang terus membesar. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri, perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sejak 2018 memicu meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi dua negara tersebut melambat. Perlambatan ini menyebar pada negara lain dan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional. Sebagian besar harga komoditas turun tajam. Penurunan ekonomi ini diprediksi masih terus berlanjut, terlebih dengan merebaknya kasus Corona.

Menurunnya kinerja ekspor mendorong pemerintah memberi perhatian terhadap produk halal. Hal ini mengingat potensi produk halal dalam memasuki pasar ekspor *global* sehingga dapat membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD). Terlebih produk halal Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk bersaing pada pasar ekspor negara muslim. Produk halal Indonesia pada gilirannya pula akan membantu mengurangi impor produk halal yang sebenarnya juga menjadi penyebab CAD yang membebani neraca perdagangan. Perbaikan CAD tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek karena masalahnya adalah pada ekspor komoditas sebagai tumpuan struktur perekonomian.

Oleh karena itu, investasi domestik harus diarahkan untuk membangun industri bahan baku bernilai tambah yang mendorong ekspor. Ekspor menjadi opsi terbaik daripada pemerintah mencari pinjaman luar negeri untuk memperbaiki CAD guna mengendalikan nilai tukar rupiah. Pemasalannya, meningkatnya ketidakpastian ekonomi *global* akibat eskalasi perang dagang

dapat memicu *capital outflow* dari Indonesia menuju *safe haven*.

Keinginan Indonesia sebagai pusat halal dunia, maka cetak biru logistik halal harus terintegrasi dengan cetak biru industri halal nasional. Peningkatan permintaan produk halal tentunya mendorong kebutuhan logistik halal. Logistik halal merupakan bagian dari sistem manajemen rantai pasokan halal (*halal supply chain management/HSCM*). HSCM secara sederhana dapat didefinisikan sebagai rantai pasokan produksi yang bersertifikasi halal mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen akhir.

Saat ini HSCM telah menjadi standar halal dalam pengaturan penyediaan bahan baku produksi, proses pengolahan, pemasaran, promosi, hingga produk siap konsumsi. Logistik halal bersama *halal procurement*, *halal manufacturing*, dan *halal distribution* merupakan komponen utama pembentuk HSCM. Ruang lingkup logistik meliputi gudang (*warehouse*), pelabuhan (*port*), kapal udara, dan laut serta semua hal yang berhubungan dengan fasilitas penanganan (*handling facility*).

Berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, logistik halal dipetakan sebagai rantai nilai dari klaster makanan dan minuman halal, fesyen halal, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan komestik halal. Bahkan, perbankan syariah didorong untuk meningkatkan pembiayaan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan basis *start up* yang terdapat pada sektor logistik.

Terkait dengan ekonomi digital yang digaungkan pemerintah, MEKSI 2019-2024 juga telah memetakan kebutuhan pengembangan teknologi tepat guna dan mutakhir untuk efisiensi

“*The State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019* mencatat *market size* industri halal global pada 2017 mencapai USD 2,107triliun. Pada 2023, diprediksi meningkat menjadi US\$3,007triliun. Hal ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya populasi muslim dunia dan juga kesadaran masyarakat muslim untuk menjalankan ajaran agama.”

produk halal, diantaranya melalui sistem informasi yang terintegrasi untuk *traceability* produk halal. *Traceability* berperan dalam memastikan kehalalan komponen produk halal untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap proses sertifikasi halal. *Traceability* digunakan untuk mengecek produk halal, mulai dari perolehan komponen bahan baku, proses produksi, hingga logistik dan distribusi produk yang dilakukan secara sistematis.

Masalah yang dihadapi

Merujuk Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), maka kewajiban bersertifikat halal pada produk yang masuk dan beredar di seluruh wilayah Indonesia per 17 Oktober 2019 telah berlaku. Pasca berlakunya UU JPH, diperkirakan permintaan sertifikasi halal untuk sektor logistik akan terdongkrak pula. Sertifikasi halal untuk sektor logistik bertujuan untuk menjamin produk yang halal tetap terjaga status halal sejak dari bahan baku hingga menjadi produk jadi sampai pada tangan pelanggan. Perusahaan logistik yang telah bersertifikasi halal berarti telah memberi jaminan bahwa proses operasi didalamnya halal dalam menangani produk halal.

Merujuk Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan, dan

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), terdapat delapan perusahaan logistik halal di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah pemain asing. Kedelapannya bergerak dalam bidang penyediaan jasa pergudangan dan *transporter*. Mereka bermain pada sektor ini umumnya lebih disebabkan *market driven*.

Tuntutan dari produsen produk halal, terutama produk makanan halal, mendorong perusahaan logistik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebelumnya, sertifikasi logistik halal dilakukan oleh LPPOM MUI. Sertifikasi dilakukan sebagai bentuk jaminan dari perusahaan bahwa produk halalnya tidak terkontaminasi produk *non-halal*. Pengembangan logistik halal di Indonesia saat ini dihadapkan sedikitnya pada lima persoalan.

Pertama, masalah literasi. Kebanyakan masyarakat, termasuk pelaku logistik, halal lebih diorientasikan pada konten kandungan produk. Proses distribusi produk, mulai dari pengiriman bahan mentah kepada pabrikan hingga disalurkan kepada konsumen akhir, kerap dianggap bukan sebagai bagian yang *inherent* dengan produk halal. Padahal, dalam HSCM, logistik halal merupakan bagian terintegrasi dari ekosistem halal.

Kedua, praktek industri halal Indonesia saat ini masih berkuat pada sertifikasi halal produk, belum pada pergerakan atau perpindahan produk. Kewajiban sertifikasi halal bagi industri makanan dan minuman sebagai sektor industri pertama yang dikenai kewajiban lantaran dinilai paling siap dan berhubungan langsung dengan masyarakat menjadikan kebutuhan akan logistik halal dianggap belum mendesak. Hal ini juga sekaligus mengindikasikan bahwa Indonesia

masih memerlukan waktu lebih panjang lagi untuk membangun ekosistem halal yang berkelanjutan.

Ketiga, kurangnya regulasi dari pemerintah yang dapat menjadi landasan bagi sektor logistik berperan lebih besar dalam rantai pasokan produk-produk halal. Payung hukum bagi logistik halal masih mengandalkan UU JPH yang juga belum diturunkan menjadi peraturan pemerintah. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri, kehadiran UU JPH membawa gaung besar yang kondusif bagi terciptanya ekosistem industri halal.

Keempat, di Indonesia saat ini pengembangan produk halal belum dilakukan dalam sistem rantai pasokan secara menyeluruh mulai dari pengadaan bahan baku, pengepakan, pergudangan, transportasi, dan distribusi. Perlu dikembangkan rantai nilai produk halal dengan membangun kawasan "*halal logistics park*", kewirausahaan produk halal, kawasan "industri dan UKM produk halal", pengembangan ekspor produk-produk halal, serta dukungan dari lembaga keuangan syariah.

Kelima, belum terintegrasinya prosedur, proses, pengawasan sertifikasi produk halal antara MUI dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai penerbit sertifikasi produk halal dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan. Harmonisasi, standarisasi, dan perluasan cakupan proses sertifikasi halal – tidak hanya produk halal, harus juga mencakup proses rantai pasokan dan proses logistiknya.

Keenam, masih sedikitnya penyedia jasa logistik halal yang memberikan layanan logistik halal

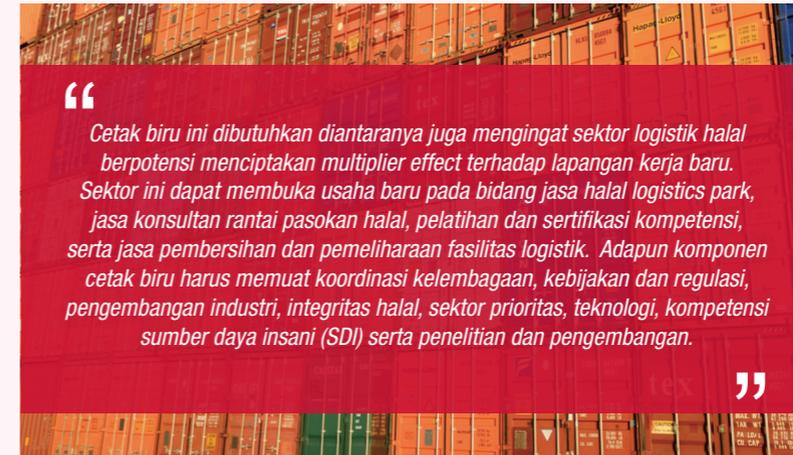
dengan standarisasi dan tersertifikasi. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan insentif atau peraturan pemerintah sebagai turunan UU JPH untuk mendorong penyedia jasa logistik ikut memberi layanan halal atau mendorong hadirnya pemain baru yang bergerak pada logistik halal. Insentif dan peraturan pemerintah ini bisa berupa pengurangan pajak, memfasilitasi penyediaan dan perbaikan infrastruktur logistik di bandara, pelabuhan, terminal, depo, yang mendukung operasional dan standarisasi logistik halal.

Cetak biru

Keberadaan cetak biru logistik halal nasional menjadi mendesak jika Indonesia memang berkomitmen untuk menjadi pusat halal dunia. Masih sedikitnya pemain di sektor logistik halal memberi keuntungan tersendiri bagi Indonesia untuk segera menyusunnya sebelum semakin banyak pemain asing masuk pada sektor logistik nasional.

Cetak biru ini dibutuhkan diantaranya juga mengingat sektor logistik halal berpotensi menciptakan *multiplier effect* terhadap lapangan kerja baru. Sektor ini dapat membuka usaha baru pada bidang jasa *halal logistics park*, jasa konsultan rantai pasokan halal, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, serta jasa pembersihan dan pemeliharaan fasilitas logistik.

Adapun komponen cetak biru harus memuat koordinasi kelembagaan, kebijakan dan regulasi, pengembangan industri, integritas halal, sektor prioritas, teknologi, kompetensi sumber daya insani (SDI) serta penelitian dan pengembangan. Literasi masyarakat juga merupakan komponen yang tidak boleh terlupakan. Perlunya peningkatan literasi yang masif agar logistik halal dapat menjadi arus baru



“

Cetak biru ini dibutuhkan diantaranya juga mengingat sektor logistik halal berpotensi menciptakan multiplier effect terhadap lapangan kerja baru. Sektor ini dapat membuka usaha baru pada bidang jasa halal logistics park, jasa konsultan rantai pasokan halal, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, serta jasa pembersihan dan pemeliharaan fasilitas logistik. Adapun komponen cetak biru harus memuat koordinasi kelembagaan, kebijakan dan regulasi, pengembangan industri, integritas halal, sektor prioritas, teknologi, kompetensi sumber daya insani (SDI) serta penelitian dan pengembangan.

”

industri logistik nasional. Mengingat potensinya yang besar, selain juga dalam rangka melaksanakan amanat UU JPH. Pengembangan logistik halal di Indonesia perlu melibatkan setidaknya tujuh pemangku kepentingan.

Pertama, inisiator atau asosiasi logistik halal. Inisiator melakukan *campaign* produk halal dan logistik halal ke berbagai segmen masyarakat, untuk menyadarkan pentingnya logistik halal untuk pengelolaan rantai pasok produk-produk.

Kedua, regulator. Pemerintah sebagai regulator sistem logistik halal perlu memberikan kebijakan sistem logistik halal, yang mencakup kebijakan infrastruktur, regulasi, standarisasi pergudangan logistik halal, standarisasi transportasi logistik halal, sertifikasi logistik halal, pengawasan, dan pembinaan pelaku usaha penyedia jasa logistik halal. Dalam melaksanakan fungsi ini, pemerintah dapat membentuk Badan Logistik Halal Indonesia.

Ketiga, perguruan tinggi atau *edukator*. Perguruan tinggi berperan sebagai pusat studi dan riset logistik halal dan pengembangan kompetensi SDI dan organisasi logistik halal. Riset logistik halal

diarahkan untuk mengembangkan sistem logistik, infrastruktur, teknologi, dan proses bisnis logistik halal. Riset juga diarahkan untuk pengembangan pasar logistik halal, baik segmen pasar domestik maupun internasional.

Keempat, penyedia teknologi. Penyedia teknologi logistik halal akan memberikan dukungan teknologi, baik teknologi material *handling, information and communications technology* (ICT), maupun transportasi yang diperlukan dalam proses operasi logistik halal.

Kelima, jasa penyedia logistik halal. Jasa penyedia logistik halal merupakan perusahaan *third party logistics* (3PL) yang menyediakan jasa pengelolaan logistik halal. Diperlukan standarisasi dan sertifikasi SDI dan organisasi perusahaan penyedia logistik halal.

Keenam, produsen. Produsen berperan penting sebagai penyedia produk-produk halal, dan memastikan bahwa produk-produk telah mendapat sertifikasi halal.

Ketujuh, pelanggan. Pelanggan sebagai pengguna produk halal memperoleh layanan dan produk halal sesuai standar dan sertifikasi produk halal dan logistik halal. Kemauan membayar dari

pelanggan salah satu isu penting dalam mendukung implementasi logistik halal.

Pengembangan logistik halal ini akan memberikan banyak peluang bisnis, antara lain: (1) Jasa logistik (3PL atau *fourth-party logistics*). (2) Solusi teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas sistem *traceability* asal dan tujuan aliran material dan produk di sepanjang rantai pasokan. (3) Jasa *halal logistics park*, pabrik, dan gudang. (4) pengembangan dan pemeliharaan aset. (5) Jasa konsultan rantai pasokan. (6) Perancangan dan pengadaan penanganan material dan sistem rak. (7) Pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDI dan organisasi. (8) Jasa pembersihan dan pemeliharaan fasilitas logistik.

Pendapat bahwa logistik yang telah menerapkan *International Organization for Standardization* (ISO) maka secara otomatis telah menerapkan praktek logistik halal bukanlah hal yang tepat. Termasuk juga pendapat bahwa Indonesia tidak perlu menerapkan logistik halal karena akan meningkatkan biaya logistik. Keduanya tidak menjadi pembenaran bahwa Indonesia tidak membutuhkan sertifikasi logistik halal. Sertifikasi bukan sekedar masalah sertifikat halal *an sich* belaka, melainkan juga bentuk transformasi struktural untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing melalui rantai nilai halal sehingga tercipta ekosistem bagi industri halal.

Jelas, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan logistik halal di Indonesia. Untuk itu, cetak biru logistik halal nasional dibutuhkan sebagai panduan menuju arah tersebut. Kasus Corona dapat menjadi momentum bagi pemangku kepentingan halal di Indonesia untuk menggaungkan kebutuhan akan hadirnya cetak biru ini. *Wallahu a'lam bish showab*.



Menilik Peluang Logistik Halal Indonesia dengan Balance Scorecard



Gema Firman Ilahi, S.Akun
Pengurus ISEFID chapter Malaysia dan Mahasiswa S2 IJU Malaysia



Rizkiyyah Al Husanaa', S.E
Pengurus ISEFID chapter Malaysia dan Mahasiswa S2 INCIEF



Imam Zulfian, S.Akun
Pengurus ISEFID chapter Malaysia dan Mahasiswa S2 IJU Malaysia

Lebih dari 80% penduduk Indonesia merupakan penganut agama Islam yang memiliki peraturan spesifik mengenai halal. Karenanya, Indonesia menjadi pangsa pasar yang empuk dalam industri halal. Dalam *Global Islamic Economy Report 2018-2019* disebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar konsumen pada lima sub-sektor di kategori pariwisata halal dan *mode (fashion) muslim*, yaitu pada *food, travel, apparel, media*, dan *pharmaceutical expenditure*.

Meningkatnya kesadaran akan konsumsi produk halal menjadikan sertifikasi halal sebuah peluang dan kebutuhan bagi produsen di dunia. Tak hanya pada bidang manufaktur saja, kehalalan pada industri jasa juga dibutuhkan untuk menguatkan rantai nilai halal (*halal value chain*) dan memenuhi kebutuhan konsumsi halal masyarakat.

Salah satu bidang jasa yang mempunyai peran penting dalam rantai nilai halal adalah jasa logistik. Terlebih lagi, menurut *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* kondisi industri syariah Indonesia yang masih dipasok oleh produk impor. Fakta tersebut menjadikan logistik

halal sebuah urgensi dan peluang bisnis yang baik dalam rantai nilai halal Indonesia. Contoh perusahaan logistik yang telah tersertifikasi halal adalah MAB Kargo Sdn Bhd milik Malaysia. Perusahaan ini memiliki spesialisasi di alur proses logistik halal, *halal-compliance warehouse storage, halal team*, dan ULD halal yang teridentifikasi. Contoh lainnya adalah Nippon Express yang bahkan telah menerima sertifikasi halal dari Indonesia, Malaysia dan Jepang.

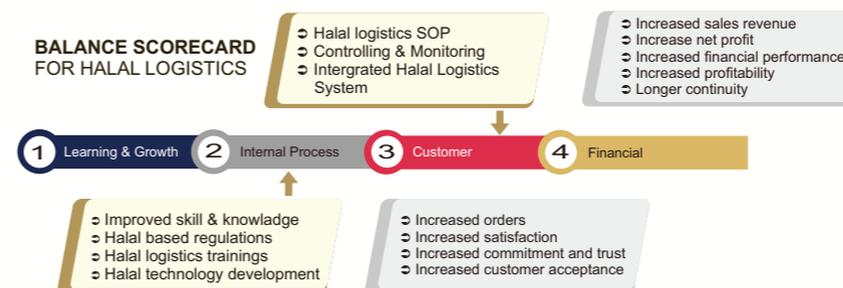
Sayangnya, saat ini hanya sembilan perusahaan logistik yang terdaftar dalam LPPOM MUI dari sekian banyaknya perusahaan logistik di Indonesia. Berbagai pro dan kontra atas pentingnya label halal pada bidang logistik juga menjadi isu. Pasalnya, beberapa pihak menilai bahwa logistik halal bukanlah sebuah kebutuhan di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Selain itu, sertifikasi halal dianggap berpotensi untuk meningkatkan biaya logistik. Padahal, jika ditilik dari sisi *balance scorecard*, perusahaan logistik sangat mempunyai peluang yang besar untuk diuntungkan dengan melakukan sertifikasi halal pada produk tertentu.

Balance Scorecard pada Logistik Halal.

Dalam bisnis, *Balance Scorecard* (BSC) adalah suatu metode untuk mengukur dan menilai kinerja suatu perusahaan, apakah aktivitas-aktivitas operasional suatu perusahaan dalam skala yang lebih kecil sejalan dengan sasaran yang lebih besar dalam hal visi dan strategi. BSC pertama kali dikembangkan dan digunakan pada perusahaan *Analog Devices* pada tahun 1987 dengan mengukur empat perspektif yaitu: perspektif keuangan (*financial*), perspektif pelanggan (*customer*), perspektif proses bisnis internal (*internal process*), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth*). Dengan tidak hanya berfokus pada hasil finansial melainkan juga masalah manusia, BSC membantu memberikan pandangan yang lebih menyeluruh pada suatu perusahaan yang pada gilirannya akan membantu organisasi untuk bertindak sesuai tujuan jangka panjangnya.

Metode *Balance Scorecard* (BSC) telah diakui sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, sebuah perusahaan logistik pun dapat

BALANCE SCORECARD FOR HALAL LOGISTICS



menerapkan konsep ini untuk menjamin kehalalan produk yang di distribusikan ke pelanggan dengan mengkombinasikan prinsip-prinsip perspektif BSC secara umum dengan prinsip logistik halal untuk mencegah *cross-contamination* dengan produk *non-halal*.

- Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning & growth*) Pada perspektif ini, kinerja perusahaan diukur dengan berfokus pada kualitas sumber daya manusia, organisasi, *supply chain*, dan sejenisnya. Jika dikaitkan dengan logistik halal, sebuah perusahaan dapat melakukan beberapa strategi dalam rangka merancang sebuah organisasi yang berpegang teguh pada logistik berbasis halal, antara lain:
 - Meningkatkan pengetahuan dan *skill* SDM perusahaan terkait pentingnya halal dalam dunia logistik.
 - Melakukan pelatihan kepada pegawai terkait proses logistik halal.
 - Menyusun kebijakan-kebijakan yang mendukung prinsip logistik halal.
 - Mengembangkan teknologi yang menunjang logistik halal
- Perspektif proses bisnis internal (*internal process*) Perspektif ini merupakan hal yang vital setelah *learning & growth* dalam mewujudkan proses bisnis logistik halal. Sebuah proses internal yang baik dan halal akan menciptakan sebuah hasil rantai pasokan yang terjamin

kehalalannya tanpa adanya kontaminasi hingga ke pelanggan. Beberapa strategi dapat dilakukan sebagai berikut:

- Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) yang melibatkan seluruh komponen logistik halal dimulai dari *input, processing*, hingga *output*.
- Melakukan *controlling* berkala terhadap proses bisnis logistik halal sehingga mencegah adanya kontaminasi.
- Menyusun sistem pendistribusian logistik halal yang terintegrasi.

- Perspektif pelanggan (*customer*) Perspektif *customer* dapat dikatakan sebagai dampak dari penerapan dua perspektif sebelumnya. Dalam perspektif ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas hubungan (*relationship quality*) sebagai akibat dari proses bisnis yang ditawarkan kepada pelanggan. Alhasil, kepuasan serta komitmen dan kepercayaan pelanggan akan meningkat dengan terjaminnya barang konsumen dari kontaminasi produk *non-halal*.

Pelanggan dari jasa logistik bervariasi, mulai dari produsen, pemasok barang (*supplier*) hingga konsumen perseorangan. Untuk melengkapi kehalalan produk yang di produksi, perusahaan produsen produk halal akan mencari kurir yang dapat menjamin tidak adanya kontaminasi, yaitu perusahaan logistik halal. Dengan demikian,

produsen produk akan merasa tenang karena jasa logistik halal akan menjaga kualitas halal produk tersebut sehingga sampai ditangan pemasok hingga konsumen. Alhasil, para pihak yang membutuhkan kehadiran logistik halal akan menaruh kepercayaan untuk selalu menggunakan jasa logistik halal sehingga pemasok serta konsumen tidak perlu ragu untuk membeli barang tersebut.

- Perspektif keuangan (*financial*) Berbicara tentang finansial, tidak ada perusahaan yang memiliki kondisi finansial dengan grafik yang menurun, termasuk perusahaan logistik. Dengan menawarkan konsep bisnis logistik halal, akan tercipta sebuah proses rantai pasokan yang halal sehingga meningkatkan kepuasan, komitmen, serta kepercayaan pelanggan. Pada akhirnya, pelanggan yang mendapat positif akan sentiasa menggunakan jasa logistik halal, dan secara langsung permintaan akan konsep ini akan meningkat. Omset akan sangat dipengaruhi, yang membuat kinerja finansial perusahaan logistik halal pun akan terdongkrak.

Dengan memasukkan aspek halal pada perspektif *balance scorecard*, besar harapannya kepada industri logistik di Indonesia untuk dapat melihat peluang industri halal dan ikut andil tentunya dalam memperkuat rantai nilai halal di Indonesia. Analisis dalam tulisan ini tentunya masih sangat dangkal dan perlu untuk dikaji lebih lanjut. Akan tetapi, dapat kita sadari bahwa potensi pasar dan antusias masyarakat Indonesia terkait produk halal, label halal akan memberikan nilai lebih kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang logistik dan tentunya, tetap akan meningkatkan profit perusahaan itu sendiri.